BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pemuda

1. Pengertian pemuda dan politik

Pemuda sebagai generasi penerus yang memiliki potensi besar untuk membawa perubahan dan inovasi. Ciri khas pemuda adalah semangat, idealisme, pemikiran kritis, inovasi, sifat progresif, dan dinamisme. Pemuda dapat mendorong perubahan positif dalam masyarakat serta sistem politik.¹⁸ Dengan pemikiran kritis dan inovatif, pemuda cenderung lebih terbuka, kritis terhadap isu-isu sosial dan politik, serta mencari solusi dengan cara yang baru.

Pemuda dipandang sebagai agen perubahan.¹⁹ Potensi besar mereka menjadi pelopor perubahan terbukti dalam bidang sosial, politik, ekonomi, dan budaya, seperti yang terjadi pada peristiwa Sumpah Pemuda 1928 dan Reformasi 1998 di Indonesia. Oleh karena itu partisipasi aktif pemuda dalam politik sangat penting untuk kualitas dan keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

Pemuda sering kali menjadi bagian integral dalam dinamika politik, baik dalam konteks lokal maupun global. Mereka bisa menjadi

¹⁸ Yusril Abdul Aziz dan Eka Widya Ningrum, "Era Baru Politik Anak Muda dan Mahasiswa untuk Menentukan Pemimpin Indonesia," *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum* 9, no. 2 (2023): 62–74.

¹⁹ Widiya Ningsih, "KETERLIBATAN PEMUDA DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN: TANTANGAN DAN PELUANG," *literacy notes* 1, no. 2 (2023).

agen perubahan yang mendorong reformasi sosial dan politik, seperti yang terlihat dalam berbagai gerakan protes dan revolusi yang melibatkan kelompok pemuda.

Dalam dinamika politik, pemuda sering kali menjadi kekuatan pendorong yang signifikan, baik dalam lingkup lokal maupun global. Mereka memiliki potensi besar sebagai agen perubahan yang mampu menginisiasi reformasi sosial dan politik, sebagaimana tercermin dalam berbagai gerakan protes dan revolusi yang melibatkan partisipasi aktif kelompok pemuda.

Lebih lanjut, pemuda juga berdaya saing dalam memengaruhi kebijakan publik melalui preferensi politik mereka, keterlibatan dalam organisasi politik, serta pemanfaatan media sosial untuk menyampaikan aspirasi. Inilah mengapa politik di pemuda menjadi sangat penting, mengingat potensi mereka untuk membentuk masa depan yang lebih adil, berkelanjutan, dan sejahtera.

2. Pemuda dan Politik Menurut Kesaksian Alkitab

a. Kitab Perjanjian Lama

Daniel, Hananya, Misael, dan Azarya adalah pemuda-pemuda buangan di Babel yang menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan di tengah tekanan politik dan budaya asing. Integritas dan kebijaksanaan mereka membuat mereka dihormati dan dipercaya

di istana raja, bahkan menduduki posisi penting.²⁰ Ini mengilustrasikan bagaimana pemuda dapat mempertahankan iman dan memberikan pengaruh positif dalam sistem politik yang sekuler.

b. Kitab Perjanjian Baru

Paulus menugaskan Timotius, seorang pemuda, untuk menjadi pemimpin Jemaat di Efesus. Sehingga Paulus menuliskan surat kepada Timotius. Dalam suratnya Paulus menuliskan nasihatnya kepada Timotius untuk tidak membiarkan diremehkan karena masih berusia muda, tetapi harus menjadi teladan dalam bertindak, bertutur kata yang baik, mengasih, setia dalam pelayanan kepada jemaat, kesucian (1 Timotius 4:12).²¹ hal membuktika dalam usia muda tidak menjadi penghalang seseorang pemuda untuk menjadi pemimpin rohani dan memberikan pengaruh dalam komunitas.

B. Politik

1. Pengertian Politik

²⁰ I Timotius Subekti, *Tafsir Daniel: Nubuat Akhir Zaman* (yogyakarta: PBMR ANDI, 2021).76

²¹ Budimana R, *Taf. Alk. Surat-surat Pastoral I\&ii Timotius Dan Titus* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008).40

Politik dalam perkembangannya mengalami pengertian yang begitu luas.²² Hal ini di sadari kerana kehadiran dari politik dalam khasanah ilmu pengetahuan dan bidang-bidang ilmu pengetahuan memicu perdebatan di kalangan para ahli politik yang memiliki latarbelakang ilmu pengetahuan yang berbeda-beda. Sama halnya dengan perkembangan zaman. Sehingga dapat di sadari bahwa ketika pengertian politik juga akan terus berkembang mengikuti zaman.

Politik adalah kata yang memiliki pengertian mendalam. Secara etimologi, kata politik dalam bahasa Yunani Kuno, yaitu polis dan berarti suatu kota atau lebih tepatnya kota negara (city-state). Dalam konteks sejarah, polis merujuk pada kota-negara yang mandiri. Contohnya adalah Athena atau Sparta. Kota-negara ini memiliki struktur pemerintahan sendiri dan berfungsi sebagai unit politik serta sosial utama di Yunani Kuno. Dari istilah polis inilah kemudian lahir kata politik.²³

kata polis berkembang menjadi beberapa istilah: Polites (πολιτης) berarti warga negara, Politikos (πολιτικός) berarti berkenaan dengan warga negara atau urusan negara. Politika (πολιτικά) studi tentang urusan negara atau hal-hal yang berkaitan dengan negara kota. Melalui bahasa Latin (politicus) dan bahasa Prancis (politique), kata ini

²² S H Sirait, "Politik Kristen di Indonesia: suatu tinjauan etis" (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000), 7

²³ I Adiwidjaja, POLITIK BERNEGARA (yogyakarta: Zahir Publishing, 2017). 33

kemudian masuk ke dalam berbagai bahasa Eropa lainnya, termasuk bahasa Belanda (*politiek*) dan bahasa Inggris (*politics*), dan diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi politik.²⁴

Dalam Buku Aristoteles Politik menuliskan tentang tujuan tertinggi manusia dan bagaimana mencapai kehidupan yang baik dalam sebuah komunitas (*polis*) yaitu asosiasi politis.²⁵ Dalam konteks yang lebih luas, politik juga mencakup studi tentang pemerintahan, negara, kekuasaan, kebijakan publik, dan ideologi-ideologi yang mendasarinya.

Politik merupakan proses untuk mencapai kekuasaan atau tujuan tertentu dalam suatu masyarakat atau kelompok. Politik adalah proses untuk mencapai kekuasaan atau tujuan tertentu dalam suatu masyarakat atau kelompok. Hal ini melibatkan interaksi antara individu dan kelompok, negosiasi, konflik, dan kerja sama dalam membuat dan melaksanakan keputusan public.

2. Politik Kristen

Politik Kristen merupakan wujud dari keyakinan dan nilai-nilai Kristiani yang diimplementasikan dalam ranah politik. Prinsip-prinsip seperti kasih, keadilan, perdamaian, kebenaran, dan pelayanan menjadi landasannya. Dengan akar teologis yang meyakini Allah sebagai

²⁴ G.F.G.C. Kukathas, *Handbook Teori Politik* (Nusamedia, 2019). 691

²⁵ Saut Pasaribu, *ARISTOTELES POLITIK* (yogyakarta: Narasi, 2016). 2

pencipta dan manusia sebagai ciptaannya, politik Kristen mendorong umat untuk aktif terlibat dalam proses politik, menggunakan ajaran Alkitab sebagai acuan etis dalam menilai kebijakan, serta mengutamakan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Menurut Agustinus, salah seorang Bapa Gereja terkemuka, pemikiran politiknya didasarkan pada tiga tema utama, yaitu penciptaan, kejatuhan manusia ke dalam dosa, dan penyelamatan ilahi bagi alam semesta. Bagi Agustinus, Tuhan adalah Pencipta sekaligus Pemelihara kehidupan, yang juga menetapkan tempat dan waktu bagi setiap ciptaan. Menurut teologi Agustinus, dosa manusia hanya dapat ditebus melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus.²⁶

Berangkat dari penjelasan di atas Agustinus membagi pemikirannya tentang politik menjadi dua konsep utama, yaitu yang pertama Civitas Dei yang memiliki arti “Negara Tuhan” dan yang kedua ialah Civitas Terrena yang memiliki arti “Negara Duniawi”. Menurutnya, politik di dunia merupakan usaha yang diperlukan namun memiliki keterbatasan inheren karena berakar pada dosa manusia dan bertujuan untuk memelihara perdamaian duniawi. Kendati demikian, fokus utama kehidupan manusia seharusnya tertuju

²⁶ S H Sirait, “Politik Kristen di Indonesia: suatu tinjauan etis” (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000).134

pada Civitas Dei untuk mencapai perdamaian abadi dan persatuan dengan Tuhan.²⁷

Pandangan teologi politik John Calvin sangat dipengaruhi oleh Paulus. Calvin menekankan pentingnya kepatuhan kepada pemerintah dengan tujuan agar pemerintah dapat menjadi pelindung gereja.²⁸

Namun, bagi Calvin, apabila pemerintah tidak taat kepada Allah dan bertindak buruk terhadap sesama manusia, maka tindakan tersebut harus dilawan. Perlawanan ini tidak boleh dilakukan oleh rakyat biasa, melainkan oleh mereka yang berada dalam pemerintahan atau memiliki pengetahuan tentang ketatanegaraan atau politik.²⁹

Martin Luther, seorang tokoh reformator Gereja Protestan, dalam pandangan politiknya memisahkan antara Gereja dan negara. Ia berpendapat bahwa Khotbah di Bukit berlaku untuk gereja, sementara Hukum Taurat berlaku untuk negara. Dalam pemahaman kenegaraannya, Luther mengikuti pandangan Paulus mengenai pentingnya ketaatan kepada pemerintah karena pemerintah berasal dari Allah.³⁰

Bagi Luther, umat Kristen tidak memerlukan hukum negara. jikalau seandainya semua orang di dunia ini sepenuhnya menjadi Kristen, hukum negara tidak akan diperlukan sebab setiap orang telah

²⁷ Ibid. 135

²⁸ Ibid. 138

²⁹ Ibid. 141

³⁰ Ibid. 142

memiliki Roh Kudus di hatinya.³¹ Oleh karena itu, manusia tidak memerlukan hukum negara karena setiap orang tidak akan lagi berbuat salah, sebab mereka akan hidup adil dan rela berkorban. Akan tetapi, karena di dunia masih terdapat kejahatan, maka hukum negara tetap harus ada.

Menurut Luther, pemerintah harus taat kepada Allah dan memperhatikan rakyat. Sebaliknya, rakyat juga harus berperan aktif bagi negara. Alkitab, sebagai pedoman Luther, termasuk dalam kerangka pemikirannya untuk memahami hubungan antara gereja dan negara. Ia memandang negara sebagai salah satu alat untuk meniadakan kejahatan dan menciptakan keamanan. Oleh sebab itu, ketaatan pada hukum sangat penting, terutama bagi para penguasa dan kesejahteraan rakyat juga kewajiban gereja dan negara.³²

Dalam visi politiknya, Gereja Toraja berupaya menghadirkan tanda-tanda “Kerajaan Allah” dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga terwujud keadilan, kebenaran, hak asasi manusia (HAM), dan damai sejahtera tanpa adanya melihat perbedaan latar belakang. Tugas panggilan Gereja dalam politik adalah memberikan bimbingan pastoral serta turut meletakkan landasan moral dan etik spiritual agar tercipta dan terselenggaranya kehidupan

³¹ Ibid. 143

³² Ibid. 146

manusia dalam khazanah politik yang mendatangkan damai sejahtera dalam dunia ini.³³

Meskipun Gereja Toraja sedikit terlambat menyadari tanggung jawabnya dan merumuskan sikap terhadap fungsi praktis gereja dalam kehidupan masyarakat, bangsa. Gereja Toraja memandang politik sebagai suatu bidang pelayanan yang menekankan pada keadilan, kebenaran, demokrasi, damai sejahtera, penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM), partisipasi, dan pemeliharaan lingkungan hidup.³⁴ Oleh karena itu dalam politik bagi gereja toraja sebagai tempat tanda-tanda Kerajaan Allah.

Selain visi, Gereja Toraja juga memiliki misi, di antaranya: Gereja hadir di dunia untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani, namun tidak serupa dengan dunia. Pemahaman "berada di dunia" berarti hadir di tengah masyarakat internasional, yang disertai dengan tanggung jawab untuk memelihara kehidupan. Sehingga pelayanan kenabian dapat berjalan dengan baik dan menjadi garam dan terang di tengah dunia dan berdampak pada kehidupan manusia, di antaranya, politik, ideology, social, budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan.³⁵

³³ *MEMBANGUN JEMAAT: GEREJA DAN POLITIK* (Tangmentoe: BPS Gereja Toraja, 1998).1

³⁴ *Ibid.* 10

³⁵ *Ibid.* 18

3. Politik Uang

Politik uang merupakan praktik tercela yang melibatkan penggunaan uang atau materi untuk memengaruhi pemilih. Praktik ini dapat berupa suap kepada pemilih, pejabat publik, pendanaan kampanye ilegal. Uang sebagai alat dalam politik akan sangat merusak, karena mencederai integritas demokrasi dengan mendistorsi pilihan pemilih, memicu korupsi yang lebih luas, menciptakan ketidakadilan dalam pemilihan karena menggunakan uang sebagai alat dalam mendulang suara, dan pada akhirnya menghasilkan pelayanan publik yang buruk karena keputusan lebih dipengaruhi oleh kepentingan pemberi uang.

Seorang filsuf dan diplomat Italia menulis buku terkenal berjudul *Il Principe (Sang Pangeran)* pada awal abad ke-16. Dalam buku tersebut, Machiavelli memberikan panduan kepada para penguasa mengenai cara memperoleh, mempertahankan, dan memperluas kekuasaan. Menurut Machiavelli, seorang pemimpin harus bersedia menggunakan segala cara yang dianggap perlu termasuk kebohongan, kekerasan, dan manipulasi demi mempertahankan kekuasaannya dan menjamin stabilitas negara.³⁶

³⁶ Materi Training et al., *Niccolo Machiavelli SANG PENGUASA Surat Seorang Negarawan kepada Pemimpin Republik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014).

Machiavelli berpendapat bahwa keberhasilan dalam politik sering kali menuntut ketangguhan dan kemampuan beradaptasi dengan situasi yang tidak ideal. Pendekatan ini mengacu pada tindakan yang mengabaikan nilai-nilai moral demi keuntungan politik, seperti manipulasi opini publik, memecah belah lawan, atau menyingkirkan pesaing melalui cara-cara yang licik.³⁷

Machiavelli meyakini bahwa politik tidak dapat dibangun berdasarkan idealisme moral, melainkan harus berlandaskan pada realitas dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan ketidaksempurnaan manusia. Ia menekankan bahwa seorang penguasa harus memahami realitas yang dihadapinya dan menyesuaikan diri dengan situasi demi mempertahankan kekuasaan.³⁸

Machiavelli berpandangan bahwa politik tidak memiliki kaitan dengan moralitas. Ia menyatakan bahwa alangkah baiknya bagi seorang penguasa tidak di cintai dari pada tidak di takuti, jika tidak mungkin untuk memiliki keduanya. Lebih lanjut, ia melihat politik sebagai kondisi peperangan yang harus ditaklukkan.³⁹

Namun Teori politik Machiavelli tidak berlaku di Indonesia karena dalam Undang-Undang tentang politik uang di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Politik

³⁷ Ibid.

³⁸ Ibid.

³⁹ Ibid.

uang dan tidak mengindahkan cara apapun yang seperti halnya suap menyuap rakyat untuk memilih.

C. Etika

1. Pengertian Etika

Etika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani *ethos* yaitu yang artinya kebiasaan atau watak seseorang sebagai orientasi.⁴⁰ Etika memberikan arah tentang apa yang dipandang baik dan buruk, sehingga memberikan pengertian bagi seseorang dalam memilih sikap dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Etika juga menuntut perenungan dan pemikiran kritis kita terhadap moral. Dalam konteks etika politik, moral harus diutamakan dalam suatu pemerintahan. Moral harus menjadi komitmen bagi para penyelenggara pemerintahan di tingkat daerah, bangsa, dan negara. Contoh perilaku yang diwujudkan dalam tindakan yang lebih konkret adalah memiliki sikap berani, sederhana, berharga diri, jujur, ramah, dan cerdas.

Etika merupakan sebuah cabang ilmu yang secara sistematis mengkaji dan mengevaluasi tindakan, perilaku, serta keputusan manusia dari sudut pandang moralitas.⁴¹ Etika ialah suatu tindakan yang seharusnya dilakukan manusia yaitu: benar, baik, buruk,

⁴⁰ K Bertens, *Etika* (yogyakarta: PT Kanisius, 2013), 7

⁴¹ K Bertens, *Etika*, (yogyakarta: PT Kanisius, 2013), 4

kewajiban, serta tanggung jawab, dan selanjutnya merumuskan prinsip-prinsip yang dapat menjadi panduan dalam bertindak.

Proses etis melibatkan pemikiran kritis dan rasional, mempertimbangkan berbagai argumen dan perspektif sebelum sampai pada suatu penilaian moral.⁴² Meskipun nilai-nilai moral dapat bervariasi antar budaya dan waktu, etika seringkali mencari landasan yang lebih universal atau setidaknya koheren dalam konteks tertentu, dengan tujuan untuk mencapai kehidupan yang bermakna dan harmonis.

2. Etika Kristen

Etika Kristen adalah sebuah sistem nilai dan prinsip moral yang secara fundamental bersumber dari ajaran-ajaran yang terkandung dalam Alkitab, serta interpretasi dan pengembangan teologis dalam tradisi Kristen sepanjang sejarah. Inti dari etika Kristen adalah kasih, yang diwujudkan dalam kasih kepada Allah secara total dan kasih untuk sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri.⁴³

Perspektif etika bersifat teosentris, berarti bahwa Allah adalah pusat dari segala pertimbangan moral, dan standar tertinggi untuk kebaikan dan kebenaran adalah karakter dan kehendak Allah yang dinyatakan melalui firman-Nya. Lebih lanjut, etika Kristen juga bersifat

⁴² E Darmaputera, *Etika Sederhana Untuk Semua - Perkenalan Pertama* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2024), 20

⁴³ Norma L. Geisler, *ETIKA KRISTEN*, vol. 01 (Malang, 2017). 15

Kristosentris, menjadikan kehidupan, pelayanan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus sebagai teladan utama dalam menjalani kehidupan yang etis.

3. Etika Politik

Etika politik merupakan cabang khusus dari etika yang fokus pada dimensi moral dari kekuasaan, pemerintahan, kebijakan publik, dan perilaku warga negara dalam konteks politik.⁴⁴ Etika politik mempertanyakan dasar moral dari negara, legitimasi kekuasaan politik, tujuan dari pemerintahan, serta hak dan kewajiban individu dalam masyarakat politik. Etika politik juga menyoroti isu-isu krusial seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, transparansi, akuntabilitas, dan kepemimpinan yang bertanggung jawab.

Etika politik tidak hanya memberikan kerangka kerja normatif untuk mengevaluasi tindakan dan kebijakan politik, tetapi juga berfungsi sebagai landasan untuk mengkritisi praktik-praktik yang dianggap tidak adil atau tidak bermoral, serta menginspirasi upaya-upaya untuk menciptakan sistem politik yang lebih baik dan lebih adil.

⁴⁴ S H Sirait, *Politik Kristen di Indonesia: suatu tinjauan etis* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000). 39